

# Konsep manajemen keuangan dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMAN 3 Bukittinggi

Kurnia Mira Lestari\*, Iswantir M, Ramadhoni Aulia Gusli, Muaddyl Akhyar

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

\*kurnialestari31@guru.sma.belajar.id

## Abstract

*The lack of an education budget in high schools often makes one of the problems in improving the quality of education. For this reason, it is hoped that with the concept of optimal financial management by elements of school leaders, the quality of education will improve. The purpose of this study is to analyze how the concept of financial management at SMA Negeri 3 Bukittinggi by related elements can improve the quality of education. This research uses qualitative research methods based on literature study. The results of the study explain that the source of funds for SMA Negeri 3 Bukittinggi comes from the School Operational Assistance (BOS) fund, Special Financial Assistance (BKK) and the Committee. With these 3 sources of funds, it is found that optimizing financial management greatly affects the quality of education. The concept of financial management applied by the leadership elements of SMA Negeri 3 Bukittinggi can optimize the source of funds, so that existing funds are right on target and have a strong effect on student achievement and learning so as to improve the quality of school education.*

**Keywords:** Education Quality; Financial Management; School Operational Assistance

## Abstrak

Minimnya anggaran pendidikan pada sekolah menengah atas, kerap menjadikan salah satu masalah dalam peningkatan mutu pendidikan. Untuk itu diharapkan dengan adanya konsep manajemen keuangan yang optimal oleh para unsur pimpinan sekolah, mutu pendidikan akan meningkat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana konsep manajemen keuangan pada SMA Negeri 3 Bukittinggi oleh unsur yang terkait dapat meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi pustaka. Hasil penelitian menjelaskan bahwa sumber dana SMA Negeri 3 Bukittinggi berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Khusus Keuangan (BKK) dan Komite. Dengan adanya 3 sumber dana ini, didapatkan bahwa optimalisasi manajemen keuangan sangat mempengaruhi mutu pendidikan. Konsep manajemen keuangan yang diterapkan oleh unsur pimpinan SMA Negeri 3 Bukittinggi dapat mengoptimalkan sumber dana, sehingga dana yang ada tepat sasaran dan berpengaruh kuat untuk prestasi siswa dan pembelajaran sehingga bisa meningkatkan mutu pendidikan sekolah.

**Kata kunci:** Bantuan Operasional Sekolah; Manajemen Keuangan; Mutu Pendidikan

## **Pendahuluan**

Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, diperlukan sejumlah faktor yang saling terkait. Di antaranya adalah pengelolaan sumber daya yang ada di lembaga pendidikan secara menyeluruh dan kompeten. Masalah keuangan di sekolah merupakan salah satu sumber daya yang perlu dikelola dengan baik di lembaga pendidikan. Salah satu aspek terpenting dalam administrasi sekolah yang menentukan bagaimana kegiatan pendidikan di sekolah adalah manajemen keuangan pendidikan. (Zietlow, J., Hankin, J. A., Seidner, A. & O'Brien, 2018). Salah satu sumber daya yang secara langsung mendukung efektivitas dan efisiensi manajemen pendidikan adalah keuangan dan pembiayaan. Gaya manajemen yang digunakan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan akan berdampak signifikan terhadap inisiatif peningkatan kualitas yang dilakukan oleh lembaga tersebut. (Solehan, 2017). Masyarakat, pemerintah, dan sektor komersial memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan. Dengan demikian, pendidikan adalah tugas bersama masyarakat dan pemerintah, baik dalam hal pembiayaan, tenaga kerja, maupun fasilitas. (Monita, 2019).

Ketiadaan anggaran untuk pendidikan sering kali mempersulit pencapaian tujuan pendidikan. Keberadaannya sangat penting, meskipun itu bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi seberapa baik pendidikan diajarkan. Bisa dikatakan bahwa sebuah institusi pendidikan akan tetap berfungsi meskipun tanpa adanya dana. Tidak diragukan lagi akan ada pertumbuhan jumlah program yang ditawarkan, yang semuanya secara alami akan meningkatkan standar pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan dianggap penting dalam konteks baik di tingkat makro (negara) maupun mikro (institusi). Salah satu komponen yang diperlukan adalah pembiayaan. Sebagai gambaran, pemerintah Republik Indonesia diwajibkan oleh hukum untuk mengalokasikan setidaknya 20% dari keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan setiap tahunnya. Setiap tahun, APBN dan pemerintah daerah membuat anggaran untuk pendidikan yang mencakup ketentuan untuk gaji guru dan gaji profesional pendidikan lainnya di daerah tersebut. (Monita, 2019)

Implementasi Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 berdampak pada keharusan untuk membuat standar pembiayaan yang menstandarkan biaya yang terkait dengan pendidikan, termasuk biaya operasional, investasi, dan personal. Selain itu, disebutkan bahwa Peraturan Menteri, yang didasarkan pada saran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), menetapkan norma biaya satuan pendidikan. Setiap sekolah di Indonesia diharapkan dapat melaksanakan pendidikan dengan menggunakan pedoman pembiayaan pendidikan ini sebagai panduan. (Nasional, 2013). Pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan harus sangat peduli terhadap pembiayaan pendidikan karena manfaatnya yang sangat luas dan menyentuh semua sektor kehidupan masyarakat. Berdasarkan pemikiran tersebut, mempelajari

masalah pembiayaan menjadi sangat strategis. Salah satu isu utama yang membuat pendidikan terus berjalan adalah pembiayaan pendidikan. Mutu pendidikan akan dipengaruhi oleh administrasi pembiayaan pendidikan yang efektif. Manajemen biaya pendidikan yang terbaik diperlukan untuk mencapai standar keunggulan sekolah yang tinggi. Oleh karena itu, perlu diperhatikan tahapan-tahapan administrasi pembiayaan pendidikan. Pada dasarnya, tujuan pengelolaan pembiayaan pendidikan adalah untuk standar sekolah yang diterapkan. Pada setiap tahapan proses pengelolaan pembiayaan, sekolah harus mewujudkan visi dan misi sekolah adalah prioritas utama. Tahapan manajemen pembiayaan pendidikan melalui tahapan perencanaan pembiayaan pendidikan, tahapan pelaksanaan pembiayaan, dan pengawasan pembiayaan pendidikan. (Solehan, 2017)

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep dasar manajemen keuangan dalam meningkatkan mutu pendidikan pada lembaga pendidikan, yaitu SMA Negeri 3 Bukittinggi. Penelitian ini memiliki urgensi kepada para unsur pimpinan sekolah agar dapat mengoptimalkan manajemen keuangan agar mutu pendidikan di sekolah dapat meningkat. Beberapa penelitian berkenaan tentang manajemen keuangan pada lembaga pendidikan sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti Filantropi Islam sebagai basis pengelolaan keuangan lembaga pendidikan (Mukhlisin, M., Mujahidin, E. & Indupurnahayu, 2019), konsep dasar manajemen keuangan pendidikan (Komariah, 2018), Manajemen finansial pendidikan dengan fokus kajian pada sistem perpajakan (Mesiono, M., & Lubis, n.d.). Namun belum ada penelitian yang membahas bagaimana konsep manajemen keuangan agar dapat meningkatkan mutu pendidikan di lembaga pendidikan. Sehingga peneliti berharap, penelitian ini bisa menjadi rujukan untuk pengelolaan manajemen keuangan di lembaga pendidikan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep manajemen keuangan sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 3 Bukittinggi.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penggambaran proses perilaku subjek digambarkan dalam bentuk naratif sehubungan dengan masalah yang dihadapi, disertakan dengan keikutsertaan informan. Selain itu penelitian ini merupakan penelitian pustaka, yakni penulis menghimpun data dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, artikel, dan lain-lain. Karena tujuan peneliti untuk mendeskripsikan bagaimana manajemen keuangan untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 3 Bukittinggi, maka peneliti memilih pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Frankel dan Anggito (2018), metodologi penelitian dalam studi semacam ini akan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil. Alih-alih disajikan dalam bentuk statistik numerik, informasi dari survei, observasi, dan wawancara disampaikan melalui narasi. Lingkungan naturalistik, yang berusaha

mereplikasi dunia nyata semirip mungkin, digunakan untuk penelitian. Adapun lokasi dan periode studi adalah dari Oktober 2023 hingga penelitian ini selesai, peneliti melakukan banyak upaya. Administrasi keuangan dan sumber dana di SMA negeri 3 Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, cocok untuk penyelidikan ilmiah, itulah sebabnya sekolah ini dipilih untuk penelitian ini. Observasi partisipan, wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, dan pencatatan yang cermat merupakan teknik utama yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data. Selain itu, data yang dikumpulkan dari dokumen tertulis, kuesioner, dan wawancara diringkas, disajikan, dan ditelaah untuk membuat kesimpulan.(Sugiyono, 2014). Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Bukittinggi, yang menangani pengelolaan keuangan tersebut, merupakan salah satu narasumber dalam penelitian ini.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Temuan penelitian**

#### **1. Definisi pengelolaan keuangan lembaga pendidikan atau sekolah**

Pengelolaan keuangan lembaga pendidikan atau sekolah sangatlah memerlukan sebuah manajemen. Manajemen dianggap ilmu yang mempelajari mengapa dan bagaimana orang bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerja sama yang lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMAN 3 Bukittinggi, sistem manajemen sekolah sangat penting. Sumber daya manusia yang profesional akan membantu manajemen pendidikan tersebut berjalan secara efektif dan efisien. Kurikulum harus sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa, tenaga pendidik yang handal dengan kemampuan dan komitmen yang kuat, sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, dana yang cukup untuk membayar karyawan sesuai dengan pekerjaan mereka.(Gusli, Zaki, & Akhyar, 2023)

Memadukan sumber daya untuk membantu siswa mencapai tujuan tertentu dikenal sebagai manajemen pendidikan. Namun, fenomena saat ini adalah manajer dan pimpinan kurang memperhatikan manajemen keuangan suatu institusi pendidikan. Menurut Depdiknas (2000) bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Jadi, manajemen keuangan lembaga pendidikan yaitu suatu ilmu, seni, gaya yang meliputi POAC dalam mengatur keuangan lembaga pendidikan atau sekolah agar tujuan lembaga atau sekolah sesuai dengan target yang ingin dicapai secara efektif dan efisien. Sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu lembaga pendidikan atau sekolah secara umum dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu: 1. Pemerintah, baik pemerintah pusat atau daerah, maupun kedua-duanya yang bersifat umum atau khusus yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan, 2. Orang tua peserta didik, 3. Masyarakat, baik yang mengikat maupun tidak mengikat. Untuk menjalankan sebuah manajemen keuangan maka sangat diperlukan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara

transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Secara umum tujuan manajemen keuangan yaitu: Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah, dan meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.

Agar tujuan di atas dapat tercapai, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam mengali sumber-sumber dana menempatkan bendahara yang seusia dengan kriteria sebagai pengelola keuangan serta memanfaatkan secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

## **2. Prinsip-prinsip manajemen keuangan**

Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi transparansi, dan akuntabilitas publik.

### **a. Transparan**

Di bidang manajemen, transparan berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan yang sedang berjalan. Di lembaga pendidikan atau sekolah harus transparan seperti di dalam sebuah lembaga atau sekolah bahwa lembaga pendidikan atau sekolah membuat semua orang tahu tentang apa yang terjadi dengan uang mereka, bagaimana mereka digunakan, dan siapa yang bertanggungjawab atas itu. Hal ini sangat penting karena pihak yang berkepentingan dapat mengetahui semuanya. Untuk meningkatkan dukungan orang tua siswa, masyarakat, dan pemerintah dalam menjalankan seluruh program pendidikan di sekolah, transparan keuangan sangatlah penting. Transparan juga membangun kepercayaan antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi yang mudah dan akurat.

### **b. Efektivitas**

Pencapaian tujuan biasanya didefinisikan sebagai efektif. Hasibuan, 2021 mendefinisikan efektivitas lebih dalam karena efektivitas mencakup hasil kualitatif yang berkaitan dengan pencapaian tujuan lembaga dari pada hanya pencapaian tujuan. Jika kegiatan yang dilakukan dapat mengatur dana untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai hasil kualitatif sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka manajemen keuangan dianggap Memenuhi prinsip efektif.

### **c. Efisiensi**

*Efficiency "characterized by quantitative outputs"* Hasibuan, 2021). Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*) atau antara daya dan hasil.

## **3. Tugas pengelolaan keuangan lembaga pendidikan atau sekolah**

Manajemen keuangan menganut prinsip bahwa fungsi otorisator, ordonatur, dan bendahara berbeda. Otorisitor yaitu pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil

tindakan yang menyebabkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Otorisator juga berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otoritas yang telah ditetapkan. Bendahara yaitu seorang yang memiliki otoritas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang atau surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang serta melakukan perhitungan dan bertanggungjawab. Sebagai manajer, kepala sekolah bertindak sebagai otorisator dan diberi wewenang ordonator untuk mengatur pembayaran. Meskipun demikian tidak masuk akal untuk melakukan peran bendahara karena tanggung jawab untuk mengawasi ke dalam. Bendahara tidak hanya memiliki fungsi bendahara tetapi mereka juga memiliki fungsi ordonatur untuk menguji hak atas pembayaran. Manajer/Kepala Bagian Keuangan sekolah berkewajiban untuk menentukan keuangan sekolah, cara mendapatkan dana untuk infrastruktur sekolah serta penggunaan dana tersebut untuk membiayai kebutuhan sekolah. Yang harus dimiliki oleh Kepala Bagian Keuangan yaitu: strategi keuangan. Strategi tersebut antara lain:

- a. *Strategic Planning*, Berpedoman keterkaitan internal dan kebutuhan eksternal yang datang dari luar. Terkandung unsur analisis kebutuhan, proyeksi, peramalan, ekonomi dan finansial.
- b. *Strategic Management*, Upaya mengelola proses perubahan, seperti: perencanaan, strategis, struktur organisasi, kontrol, strategis dan kebutuhan primer.
- c. *Strategic Thinking* Sebagai kerangka dasar untuk merumuskan tujuan dan hasil secara berkesinambungan.

#### **4. Proses pengelolaan keuangan lembaga pendidikan/sekolah**

Komponen keuangan sekolah merupakan komponen yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar mengajar bersama komponen-komponen lain. Dalam pengelolaan, memperlihatkan cara mengatur lalu lintas uang yang diterima dan dibelanjakan mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan penyampaian umpan balik (Vincent P Costa, 2000). Perencanaan menentukan untuk apa, di mana, kapan dan beberapa lama akan dilaksanakan, dan bagaimana cara melaksanakannya. Pengorganisasian menentukan bagaimana aturan dan tata kerjanya. Pelaksanaan menentukan siapa yang terlibat, apa yang dikerjakan, dan masing-masing bertanggung jawab dalam hal apa. Pengawasan dan pemeriksaan mengatur kriterianya, bagaimana cara melakukannya, dan akan dilakukan oleh siapa. Umpan balik merumuskan kesimpulan dan saran-saran untuk kesinambungan terselenggaranya Manajemen Operasional Sekolah.

Menurut Muchdarsyah Sinungan, 1993, menekankan pada penyusunan rencana (*planning*) di dalam setiap penggunaan anggaran. Langkah pertama dalam penentuan rencana pengeluaran keuangan adalah menganalisis berbagai aspek yang berhubungan erat dengan pola perencanaan anggaran yang didasarkan

pertimbangan kondisi keuangan, *line of business*, keadaan para nasabah/konsumen, organisasi pengelola, dan *skill* para pejabat pengelola. Proses pengelolaan keuangan di sekolah meliputi: perencanaan anggaran, strategi mencari sumber dana sekolah, penggunaan keuangan sekolah, pengawasan dan evaluasi anggaran, dan pertanggungjawaban

Pemasukan dan pengeluaran keuangan lembaga pendidikan/sekolah diatur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), hal yang ada hubungannya dengan RAPBS adalah sebagai penerimaan (pemasukan/penerimaan), penggunaan (pembelajaan), dan pertanggungjawaban (pelaporan).

Dengan adanya penerimaan keuangan dari orang tua peserta didik dan masyarakat maka dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989, juga UUSPN No. 20 tahun 2003 bahwa karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan, maka tanggung jawab atas pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua. Dimensi pengeluaran meliputi biaya rutin dan biaya pengembangan. Biaya rutin adalah biaya yang dikeluarkan rutin setiap bulannya dari tahun ke tahun, seperti gaji tenaga kependidikan baik guru maupun non guru, biaya operasional, biaya pemeliharaan baik gedung maupun sarana prasarana kegiatan pembelajaran. Biaya pengembangan, seperti biaya pembangunan, perawatan dan perbaikan gedung, penambahan gedung, penambahan bangku, almari dan pengeluaran lain yang bersifat tetap.

Dalam manajemen keuangan ada beberapa komponen yang terdiri dari: Prosedur anggaran, prosedur akuntansi keuangan, pembelajaran, pergudangan, dan prosedur pendistribusian, prosedur investasi, dan prosedur pemeriksaan. Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan di bidang keuangan terutama mengenai pengeluaran keuangan sekolah. Pengevaluasian dilakukan setiap triwulan atau per semester. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan lembaga pendidikan/sekolah harus dilaporkan secara rutin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua peserta didik dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dananya. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari sekolah swasta dilakukan secara rinci dan transparan kepada dewan guru dan staf sekolah.

## **Pengaruh Mutu Pendidikan terhadap Manajemen Pembiayaan**

Dalam artian deskriptif, mutu ditentukan berdasarkan keadaan hasil tes prestasi belajar (Suderadjat, 2005). Menurut Ismail, Pawero, & Umar, (2011), penerapan manajemen mutu dalam dunia pendidikan merupakan memerlukan adanya pengelolaan yang baik dan profesional, manajemen organisasi yang baik dan penyediaan personil yang memadai dalam menjalankan proses yang baik sehingga

menghasilkan *output* yang bermutu dan berkualitas tinggi. Untuk bisa menghasilkan mutu, menurut Slamet terdapat empat usaha mendasar yang harus dilakukan dalam suatu lembaga pendidikan, yaitu: (1). Menciptakan situasi “menang-menang” (*win-win solution*) dan bukan situasi “kalah-menang” di antara pihak yang berkepentingan dengan lembaga pendidikan (*stakeholders*). Dalam hal ini terutama antara pimpinan lembaga dengan staf lembaga harus terjadi kondisi yang saling menguntungkan satu sama lain dalam meraih mutu produk/jasa yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan tersebut. (2). Perlu ditumbuhkembangkan motivasi intrinsik pada setiap orang yang terlibat dalam proses meraih mutu. Setiap orang dalam lembaga pendidikan harus tumbuh motivasi bahwa hasil kegiatannya mencapai mutu tertentu yang meningkat terus menerus, terutama sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna/langganan. (3). Setiap pimpinan harus berorientasi pada proses dan hasil jangka panjang. Penerapan manajemen mutu terpadu dalam pendidikan bukanlah suatu proses perubahan jangka pendek, tetapi usaha jangka panjang yang konsisten dan terus menerus. (4). Dalam menggerakkan segala kemampuan lembaga pendidikan untuk mencapai mutu yang ditetapkan, haruslah dikembangkan adanya kerja sama antar unsur-unsur pelaku proses mencapai hasil mutu. Mereka adalah satu kesatuan yang harus bekerja sama dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain untuk menghasilkan mutu sesuai yang diharapkan (Suderadjat, 2005).

Manajemen Peningkatan Mutu yang merupakan paradigma baru bagi manajemen pendidikan di sekolah memiliki prinsip (1) Peningkatan mutu harus dilaksanakan di sekolah, (2) Peningkatan mutu hanya dapat dilaksanakan dengan adanya kepemimpinan yang baik, (3) Peningkatan mutu harus didasarkan pada data dan fakta baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif, (4) Peningkatan mutu harus memberdayakan dan melibatkan semua unsur yang ada di madrasah, dan (5) Peningkatan mutu memiliki tujuan bahwa madrasah dapat memberikan kepuasan kepada siswa, orang tua dan masyarakat (Nurhayati, 2021).

Manajemen Pembiayaan merupakan sebuah proses dalam mengoptimalkan sumber dana yang ada, mengalokasikan dana yang tersedia dan mendistribusikannya sebagai fasilitas atau sarana pendukung proses pembelajaran sehingga tercipta proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, fokus manajemen pembiayaan pendidikan pada bagaimana sumber dana yang ada mampu dikelola secara profesional sehingga memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan (Riadi, 2016). Dalam definisi ini ada tiga kata kunci dalam manajemen pembiayaan pendidikan, yaitu: 1) Optimalisasi sumber dana Fungsi manajemen pembiayaan adalah bagaimana lembaga pendidikan mampu mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan pendidikan yang diperoleh. 2) Alokasi dalam manajemen pembiayaan pendidikan merupakan proses *financial decision*. Di sinilah kebijakan alokasi pembiayaan pendidikan ditentukan. Menurut Riadi, 2016, Kebijakan dalam menentukan alokasi ini harus mengedepankan program prioritas

dalam sebuah proses pendidikan. 3) Distribusi. Distribusi merupakan proses penyaluran dana sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan.

Pusat perhatian mendasar dari konsep ekonomi adalah bagaimana mengalokasikan sumber-sumber terbatas untuk mencapai tujuan yang beraneka ragam mungkin tak terhingga (Riadi, 2016). Keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pendidikan (Nurhayati, 2021). Kedua hal tersebut merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lainnya. Oleh karenanya SMA Negeri 3 Bukittinggi selalu berusaha melakukan pengelolaan keuangan dengan baik agar sumber keuangan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk peningkatan mutu pendidikan SMA Negeri 3 Bukittinggi.

## Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada penelitian konsep manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMAN 3 Bukittinggi ini dapat disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan merupakan sebuah proses dalam mengoptimalkan sumber dana yang ada, mengalokasikan dana yang tersedia dan mendistribusikannya sebagai fasilitas atau sarana pendukung proses pembelajaran sehingga tercipta proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Untuk mencapai mutu sekolah yang baik, biaya pendidikan harus dikelola dengan optimal. Unsur-unsur pimpinan yang memiliki kepiawaian dan pengetahuan dalam mengelola keuangan sekolah juga mempengaruhi mutu pendidikan di SMA Negeri 3 Bukittinggi. Dengan adanya konsep pengelolaan yang optimal tentunya juga menjadikan keuangan sebagai salah satu faktor yang mampu meningkatkan prestasi siswa dan kegiatan lainnya yang mampu meningkatkan mutu sekolah. Oleh karena itu, tahapan pada manajemen pembiayaan pendidikan perlu diperhatikan. Penggunaan dana efektif setiap lembaga pendidikan, madrasah/sekolah seharusnya menetapkan rencana yang menjadi prioritas pembiayaan pendidikan secara komprehensif.

## Daftar Pustaka

- Gusli, R. A., Zaki, S., & Akhyar, M. (2023). *Tantangan Guru terhadap perkembangan teknologi agar memanfaatkan Artificial Intelligence dalam meningkatkan kemampuan siswa*. 4(3), 229–240. doi: 10.32832/idarrah.v4i3.15418
- Ismail, F., Pawero, A.M.D., & Umar, M. (2011). Education Planning and its implications for education policy during the covid-19 pademic. *International Journal for Educational and Vocational Studies*.
- Komariah, N. (2018). Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan. *Al-Afkar: Jurnal Keislaman & Peradaban*.
- Mesiono, M., & Lubis, R. R. (n.d.). Manajemen Finansial Pendidikan di Indonesia (Diskursus Sistem Perpajakan pada Institusi Pendidikan). *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*.
- Monita, D. F. (2019). No Title. *Pembiayaan dalam pendidikan*.

- Muchdarsyah Sinungan. (1993). *Dasar-dasar Management Kredit*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mukhlisin, M., Mujahidin, E., & Indupurnahayu, I. (2019). Filantropi Islam sebagai Strategi Manajemen Keuangan Lembaga Pendidikan. *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education*, 1(1), 27–36.
- Nasional, D. P. (2013). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. In *Departemen Pendidikan Nasional*, 44(2), 8–10.
- Nurhayati, N. (2021). Manajemen POACH pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pembelajaran Luring di SDII Luqman Al Hakim Batam. *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, 13(2), 381–394.
- Riadi, A. (2016). *Pendidikan Karakter Di Madrasah/Sekolah*. 14(26), 1–.
- Solehan, S. (2017). Jurnal Ansiru PAI. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan Yang Bermutu*. Jurnal Ansiru PAI.
- Suderadjat, H. (2005). *Manajemen Peningkatan Mutu di Era Otonomi Pendidikan*.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Vincent P Costa. (2000). Panduan Pelatihan untuk Mengembangkan Sekolah. In *Depdiknas*. doi: 10.33395/juripol.v4i1.11051
- Zietlow, J., Hankin, J. A., Seidner, A., & O'Brien, T. (2018). *Financial management for nonprofit organizations: policies and practices*.